

Warga Berharap Penutupan Permanen Perlintasan Sebidang di Kemayoran Batal

JAKARTA (IM) - Rencana penutupan jalur perlintasan kereta api sebidang di Jl Bungur Besar 17, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, menuai reaksi warga. Warga sekitar keberatan jika perlintasan sebidang itu ditutup permanen tanpa ada solusi.

Seorang warga bernama Rus (50), berharap selesai uji coba rencana penutupan permanen batal. Menurutnya penutupan tersebut berdampak besar pada warga.

"Sebetulnya nggak setuju, kita kan bolak-balik ke pasar, saya juga ojol, kalau ngambil penumpang jadi mutar jauh. Dibatalin aja sih pengennya kalau bisa," katanya saat ditemui di Jl Bungur Besar 17, Rabu (26/1).

Hal senada pun diungkapkan warga lain, Cunglusian (60), yang berprofesi sebagai pedagang di Pasar. Menurutnya penutupan jalan tersebut akan berpengaruh besar terhadap pendapatannya.

"Yang paling susah yang punya mobil, saya kan dagang di pasar, pengaruh sekali," katanya.

Cunglusian berharap uji coba yang dilakukan Februari tidak akan dilanjutkan. Dia harap pemerintah dapat membatalkan rencana tersebut.

"Batalin lah, jangan tutup, kesian warga di sini, cari makan jadi susah," katanya.

Burika (41), mengatakan dampak lain dari penutupan perlintasan sebidang kereta api tersebut yakni pasokan air warga menjadi lebih mahal. Bunka mengatakan jika rencana tersebut tetap dilakukan kemungkinan warga akan melakukan demo.

"Air jadi tambah mahal, karena harus muter dulu, yang tadinya Rp 5 ribu bisa jadi Rp 7 ribu sampai Rp 10 ribu, kita beli air kan buat masak dan lain-lain," katanya.

Seperti diketahui, PT KAI rencananya akan menutup pintu perlintasan sebidang di Jl Bungur 17, Kemayoran, Jakarta Pusat. Penutupan tersebut ditargetkan dimulai pada Maret 2022.

Namun, sebelum penutupan resmi, PT KAI akan melakukan uji coba terlebih dahulu. Uji coba tersebut akan dilakukan awal Februari.

"Dari Kementerian Direktorat Perkeretaapian mau melakukan uji coba penutupan di pintu perlintasan kereta, itu baru uji coba bukan ditutup, yang akan dilakukan 1 Februari," kata Asisten Perekonomian Pembangunan (Asekbang) Jakpus, Bakwan Ferizan Ginting saat dihubungi, Selasa (25/1).

Diketahui, penutupan tersebut dikarenakan adanya pengembangan di Stasiun Manggarai. Hal ini menyebabkan volume perjalanan kereta api menjadi bertambah. ● yan

Paska Penutupan TPS Illegal di Tamsel, Pemkab Segera Cari Lokasi Pengganti



Peninjauan paska penutupan tempat pembuangan sampah (TPS) di bantaran kali Cikarang Bekasi Laut (CBL) di Desa, Tambun Selatan, Selasa (25/1).

TAMBUN SELATAN (IM) - Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki, bersama Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II pada Kementerian Dalam Negeri, Iwan Kurniawan, melakukan peninjauan paska penutupan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) bantaran kali Cikarang Bekasi Laut (CBL) yang berlokasi di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Selasa (25/1).

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati mengatakan, dengan penutupan TPS CBL tersebut, pihaknya akan mengambil langkah-langkah untuk segera membereskan persoalan sampah yang ada di Kabupaten Bekasi.

"Tadi kita sudah melakukan diskusi bersama direktur Sinkronisasi Daerah dan BBWS, dan sudah ketemu solusinya, TPS ini akan dibereskan, jadi nanti kita bekerjasama melalui program Bantuan Pembangunan Infrastruktur," ungkapnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Rabu (26/1).

Lebih lanjut, Plt. Bupati mengatakan pihaknya sedang mencari titik pengganti TPS, dan sudah berkoordinasi dengan TNI Polri untuk membantu membereskan tumpukan sampah yang ada di CBL. "Kita tinggal mencari titik untuk mengganti TPS CBL ini. Karena TPS CBL ini memang harus ditutup dan tidak boleh dibuka lagi sambil kita mencari titik pengganti TPS ini," ujarnya.

Dirinya juga menyebutkan, kemungkinan ada dua langkah untuk membereskan tumpukan sampah, yakni akan dilakukan pemertan dengan menimbun menggunakan urugan dari kanal CBL, kemudian akan ditanami dengan menanam pohon untuk penghijauan.

"Ada dua langkah, pertama diratakan sambil kerjasama dengan BBWS untuk ditutup menggunakan urugan dari Kali CBL. Kedua, di hijaukan kembali sehingga kondisinya bisa kembali kesemula sehingga tidak dibuat tempat pembuangan sampah

kembali," ucapnya.

Ditemui di tempat yang sama, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II pada Kementerian Dalam Negeri, Iwan Kurniawan mengatakan, program pengelolaan sampah ini sebenarnya telah disepakati sebelumnya. Pemkab Bekasi bersama sejumlah daerah lainnya dengan pemerintah pusat telah menandatangani kesepakatan pengelolaan sampah, terutama di sekitar DAS. "Ada 8 Bupati dan Walikota serta 5 Kementerian yang datang waktu itu untuk penandatanganan kesepakatan pengelolaan sampah, termasuk Kabupaten Bekasi. Intinya soal komitmen penanganan DAS Citarum," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, program penanganan sampah ini bukan sebatas program tahunan namun berjangka hingga lima tahun. Setiap daerah termasuk Kabupaten Bekasi diminta menyiapkan lahan sehingga TPS dapat dibangun oleh pusat.

"Dananya bukan dari kami, tetapi dari Kementerian PUPR yang sudah disusun. Rencana annual workplan-nya yang telah disusun tahunan atau 5 tahunan dalam masalah sampah, khususnya di Kabupaten Bekasi. Sudah ada bantuan dana, sudah ada alokasi anggaran untuk infrastruktur TPA dan TPS, tinggal bagaimana Kabupaten Bekasi menyediakan lahannya. Jadi kunjungan ini lebih konkret, tinggal siapkan lahan, dan sudah ada anggarannya," jelasnya.

Iwan memastikan, anggaran yang disiapkan nantinya tidak hanya untuk infrastruktur TPS melainkan bagi upaya perubahan perilaku warga agar lebih peduli terhadap isu lingkungan.

"Kami yakin dengan penanganan sampah, bukan hanya infrastruktur, tapi juga penguatan kelembagaan, kesadaran masyarakat juga jadi hal yang sangat penting. Program ini sudah bergulir tinggal bagaimana lahan disiapkan," tandasnya. ● mdl

4 Metropolis

IDN/ANTARA



RENCANA TARIF LRT JABODEBEK

Rangkaian kereta Light Rail Transit (LRT) berada di Stasiun Dukuh Atas Jakarta, Rabu (26/1). Tarif LRT Jabodebek yang semula direncanakan Rp12.000 akan dinaikkan menjadi Rp15.000.

90 Sekolah di DKI Terdampak Covid-19, P2G Minta PTM 100% Dihentikan

Pelaksanaan PTM 100% yang berlangsung di tengah kekhawatiran terus meningkatnya kasus Covid-19, sejatinya tidak aman bagi guru dan siswa, kata Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri.

JAKARTA (IM) - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) minta pembelajaran tatap muka (PTM) 100% di DKI Jakarta dihentikan karena 90 sekolah terdampak Covid-19. Sejumlah siswa dan guru positif Covid-19.

Sebanyak 90 sekolah tersebut sempat ditutup dan PTM dihentikan. Dengan adanya kasus Covid-19 di sekolah, maka guru, orang tua, dan siswa merasa cemas selama pelaksanaan PTM 100% yang kini masih berjalan.

Dikatakan Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, pelaksanaan PTM 100% yang berlangsung di tengah kekhawatiran terus meningkatnya kasus Covid-19, sejatinya tidak aman bagi guru dan siswa.

"P2G meyakini, sebenarnya yang tutup lebih dari 90 sekolah, sebab ada orang tua yang belum lapor ke sekolah dan Disdik," ujar Iman.

Iman menjelaskan, jumlah sekolah yang menghentikan PTM 100% terus bertambah

tiap minggu. Semula ada 39 sekolah, lalu bertambah 43 sekolah, dan hingga saat ini ada 90 sekolah. Jakarta belum 1 bulan melaksanakan PTM.

"Kami meminta Dinas Kesehatan DKI gencar melakukan swab PCR dan active case finding kepada sekolah, siswa, dan guru, untuk mendeteksi dan memitigasi kenaikan kasus," lanjut guru SMA di Jakarta Selatan ini.

Koordinator Nasional P2G, Satriawan Salim mengatakan skema pelaksanaan PTM 100% di tengah kondisi menghadapi gelombang ketiga Covid-19, secara psikologis cukup mencemaskan bagi guru dan orang tua.

"Coba rasakan, bagaimana guru, siswa berinteraksi kayak sekolah normal, sebab 100% siswa masuk setiap hari. Sementara itu angka kasus meningkat tajam tiap hari. Ini mengganggu pikiran dan kenyamanan belajar di sekolah," ungkap Satriawan.

Satriawan menambahkan, data yang dihimpun P2G

menunjukkan, ada beberapa sekolah di Jakarta yang sudah menghentikan PTM 100% sebanyak 2 kali, hanya dalam jarak waktu 2 minggu. Hal ini disebabkan secara berulang banyak siswa dan guru yang terdeteksi positif Covid-19.

"Ada beberapa sekolah semula PTM 100%, lalu siswa kena Covid-19, PTM dihentikan 5x24 jam. Setelah itu PTM lagi, setelah beberapa hari PTM ada siswa positif lagi, terpaksa PTM dihentikan kembali. Ini kan tidak efektif. Sekolah buka tutup, buka tutup terus, tidak tahu sampai kapan," ujar Satriawan.

Di sisi lain, P2G masih menemukan banyak pelanggaran PTM 100%. Adapun pelanggaran tersebut yakni, jarak 1 meter dalam kelas yang sulit dilakukan karena ruang kelas relatif kecil ketimbang jumlah siswa, ruang sirkulasi udara tidak ada atau ventilasi udara tidak dibuka karena kelas ber-AC, siswa berkerumun, dan nongkrong bersama sepulang sekolah, dan masih ada kantin sekolah buka secara diam-diam.

Kondisi demikian akibat lemahnya pengawasan dari Satgas Covid-19 termasuk dinas terkait. Kedisiplinan terhadap prokes harus terus digaungkan, mulai dari rumah, di jalan, angkutan umum, di sekolah, dan pulang sekolah. Sehingga, bisa dibilang pelaksanaan skema PTM 100%

tidak sepenuhnya aman, lancar, dan efektif.

Berdasarkan kondisi tersebut, P2G mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan termasuk kepala daerah sekitar daerah aglomerasi menghentikan skema PTM 100% demi keselamatan dan kesehatan semua warga sekolah.

"Kami memohon agar Pak Anies mengembalikan kepada skema PTM terbatas 50%. Dengan metode belajar blended learning, sebagian siswa belajar dari rumah, dan sebagian dari sekolah. Metode ini cukup efektif mencegah learning loss sekaligus life loss," tutur Satriawan. ● yan

Vaksinasi Covid-19 Booster Bakal Dilakukan di 60 RPTRA

JAKARTA (IM) - Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Selatan (Jaksel), Fathur Rohim mengatakan, 60 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di wilayahnya disiapkan untuk menjadi lokasi vaksinasi Covid-19 tahap 3 atau booster. Menurutnya, penerapan RPTRA yang tersebar di Jakarta Selatan itu sebagai salah satu upaya mendukung percepatan vaksinasi. Adapun sejauh ini sejumlah persiapan itu sudah dilakukan.

"Pemanfaatan 60 RPTRA di Jakarta Selatan menjadi salah satu lokasi sentra vaksinasi booster dalam rangka mendukung percepatan vaksinasi di Ibukota," ujarnya pada wartawan, Rabu (26/1).

Dia menerangkan, sebagian besar RPTRA di Jakarta Selatan, khususnya yang berada di kawasan permukiman

padat penduduk selama ini sudah difungsikan menjadi sentra vaksinasi.

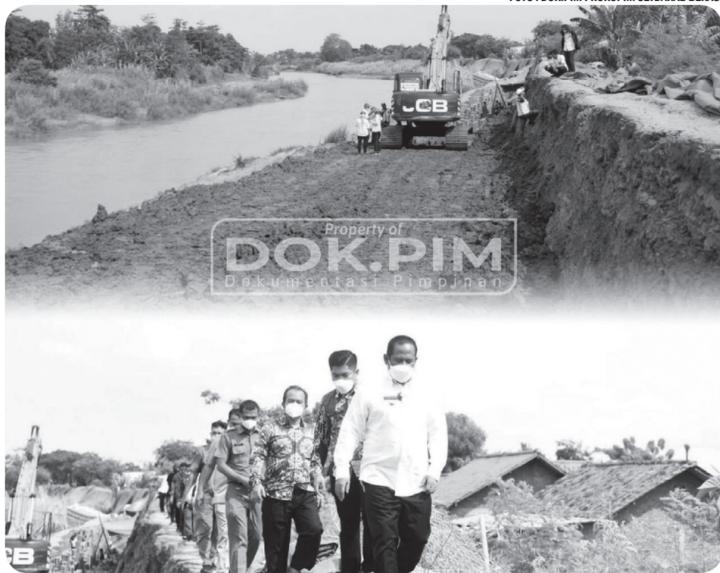
Pemanfaatan RPTRA menjadi lokasi sentra vaksinasi disertai penerapan protokol kesehatan secara ketat. Sudin PPAPP Jakarta Selatan, kata dia, juga mengerahkan ratusan petugas pengelola RPTRA untuk membantu pelaksanaan saat digelar layanan vaksin.

Sejauh ini, puluhan RPTRA di Jakarta Selatan belum dapat digunakan untuk kepentingan umum dan difungsikan menjadi lokasi sentra vaksinasi booster.

"Pengelola RPTRA difungsikan untuk membantu saat digelar layanan vaksinasi di RPTRA yakni petugas pendataan dan sebagainya. Kami juga menurunkan empat penyuluh Keluarga Berencana yang memiliki ilmu kebidanan menjadi tenaga vaksinasi di sentra vaksin," tuturnya. ● yan

49 Tanggul Kritis Sungai Citarum Akan Diperbaiki Permanen Tahun 2023

FOTO: DOK.PIM PROKOPIM SETDAKAB BEKASI



Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki (depan, gambar bawah) bersama institusi terkait meninjau kembali tanggul kritis sungai Citarum di Desa Lenggahjaya, Cabangbungin, Selasa (25/1).

CABANGBUNGIN (IM) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menargetkan untuk memperbaiki 49 tanggul kritis di Sungai Citarum secara permanen mulai tahun 2023. Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki, menyampaikannya saat meninjau kembali kondisi tanggul kritis sungai Citarum di Desa Lenggah Jaya, Kecamatan Cabangbungin, bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), serta Kementrian PPN/Bappenas, pada Selasa, (25/1).

"Dengan hadirnya pihak-pihak dari BBWS Citarum, Kemendagri, dan Bappenas untuk meninjau langsung kondisi tanggul kritis di Kabupaten Bekasi ini, artinya ada upaya diperbaikinya secara permanen walaupun realisasinya baru di 2023 nanti, tapi desainnya sudah ada di tahun ini," jelas Plt. Bupati dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Rabu (26/1).

Lebih lanjut, ia menjelaskan untuk saat ini seluruh pihak terkait masih terus beru-

kerja pihak-pihak terkait dalam memperbaiki tanggul tersebut. Besarnya wilayah yang akan dibebaskan menurutnya masih akan dikaji bersama dengan pemerintah pusat.

"Pembebasan lahan akan dilakukan karena untuk area kerja perbaikannya nanti. Ini salah satu yang diminta oleh pemerintah pusat untuk pembebasan lahan. Berapa banyak rumahnya nanti masih dikaji," terangnya.

Sementara itu, Kepala BBWS Citarum, Bastari, berharap adanya komitmen dari Pemkab Bekasi dalam merealisasikan rencana yang telah dibuat, baik dari sisi pendanaan, lahan, dan sosial sehingga nantinya pelaksanaan pembangunan tanggul secara permanen dapat berjalan dengan baik.

"Harapannya ada komitmen dari Pemkab Bekasi dengan action plan yang sudah dibuat bersama, baik dari sisi pendanaan, lahan, dan sosial, sehingga pelaksanaan penanganan banjirnya berjalan dengan lebih baik," tuturnya.

Ia menghimbau kepada

seluruh masyarakat di sekitar wilayah tanggul untuk bersama-sama menjaga dan merawat tanggul yang ada agar tetap kuat menahan banjir untuk jangka panjangnya.

"Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menjaga dan merawat tanggul ini, sehingga tanggulnya diharapkan bisa kuat menahan banjir," tutupnya.

Sebelumnya, Plt. Bupati Bekasi bersama unsur Forkopimda, BBWS Citarum, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri Iwan Kurniawan, Direktur Pengairan dan Irigasi Bappenas Abdul Malik Sadat Idris, serta Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemkab Bekasi melakukan Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Tanggul Kritis Sungai Citarum di ruang Rapat Bupati, Komplek Pemkab Bekasi.

Rapat tersebut membahas terkait rencana penanganan perbaikan sebanyak 49 tanggul kritis sungai Citarum di wilayah Kabupaten Bekasi, yang akan dilakukan oleh instansi terkait tersebut. ● mdl

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sesuai dengan Keputusan Para Pemegang Saham PT THE MASTER STEEL MANUFACTORY, berkedudukan di Jakarta Timur ("Perseroan"), yang dibuat di bawah tangan, tanggal 25 Januari 2022, bermeterai cukup dan dinyatakan dalam akta tanggal 25 Januari 2022, nomor 25 yang dibuat di hadapan Retky Francky Limpele, SH, Notaris di Jakarta Pusat, telah dilakukan penurunan modal setor/ditempatkan yang semula Rp.1.550.000.000.000,- (satu triliun lima ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp.1.534.400.000.000,- (satu triliun lima ratus tiga puluh empat miliar empat ratus juta Rupiah).

Kepada seluruh kreditor dan/atau pihak-pihak yang berkeberatan atas penurunan modal tersebut di atas dapat mengirimkan surat keberatan dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat :

Jalan Raya Bekasi Km 21,
Rawo Terate, Cakung, Jakarta Timur

dengan tembusan dikirimkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan HR Rasuna Said Kav 6-7, Jakarta Selatan.

Jakarta, 27 Januari 2021
PT THE MASTER STEEL MANUFACTORY
Direksi